

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)**



**KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN
*TAHUN 2004***

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT atas Limpahan Rahmad dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2004 unit kerja Kantor Kecamatan Sambeng dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2004 disusun atas dasar Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 sebagai wujud pertanggungjawaban secara sistematis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu demi sempurnanya laporan serupa di tahun mendatang sehingga harapan akhir bahwa dengan melihat LAKIP, seseorang atau badan hukum akan dengan mudah mengetahui keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dapat terwujud, kami sangat berterima kasih apabila terdapat saran.

Kami berharap mudah-mudahan Laporan yang sederhana ini ada guna dan manfaatnya, dan akhirnya kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridloi pengabdian kita kepada Bangsa dan Negara, Amien.

Sambeng, 15 Maret 2005

CAMAT SAMBENG



Marjono
MARJONO, S.Sos

Penata Tingkat I
NIP. 510 057 220

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
C. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEJIK	2
BAB II RENCANA STRATEJIK	4
A. RENCANA STRATEJIK	4
1. VISI	4
2. MISI	4
3. TUJUAN	4
B. RENCANA KINERJA	5
1. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	5
2. P R O G R A M	6
3. KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. PENGUKURAN KINERJA	8
B. EVALUASI KINERJA	8
C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	11
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	12
BAB IV PENUTUP	13
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah dinyatakan bahwa azas – azas umum Penyelenggaraan Negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggara negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas.

Sejalan dengan hal di atas, khususnya asas akuntabilitas telah dirumuskan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kecamatan Sambeng sesuai dengan kedudukannya sebagai Perangkat Daerah dan sejalan pula dengan azas dekonsentrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas / kegiatannya sebagaimana yang telah dibakukan dalam Rencana Strategik dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Pemerintah yang lebih atas yang dalam hal ini adalah Bupati Lamongan setiap tahun, yang tidak lain adalah suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kecamatan Sambeng merupakan salah satu dari 27 (dua puluh tujuh) kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 07 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan,

bahwa Kecamatan sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

1. TUGAS POKOK :

Membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta pembinaan ketentraman dan ketertiban.

2. FUNGSI :

- a. Pengkoordinasian segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah yang terpadu ;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan di bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta ketentraman dan ketertiban;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan administrasi serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah di Kecamatan ;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan ;
- e. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEJIK

Dalam upaya pencapaian misi terdapat hal-hal yang mendukung dan kemungkinan gagalnya misi dimaksud. Dalam kaitan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. KEKUATAN :

- a. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 07 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan ;
- b. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat ;
- c. Jumlah Perangkat Daerah yang ada di Sekretariat Kecamatan relatif memadai ;
- d. Sarana dan prasarana kerja memenuhi syarat ;
- e. Partisipasi dan peran aktif masyarakat cukup tinggi ;
- f. Terdapatnya Cabang Dinas/ Instansi dan UPT tingkat Kecamatan ;
- g. Tersedianya Unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di semua desa ;

2. KELEMAHAN :

- a. Sumber Daya Perangkat Daerah relatif belum seimbang dengan tuntutan era global ;
- b. Sumber Daya Penyelenggara Pemerintahan Desa relatif rendah ;
- c. Standart mentalitas Pamong Praja belum ada ;
- d. Masih adanya rasa egoisme sektoral Cabang Dinas/Instansi /UPT ;
- e. Kesejahteraan PNS dan Unsur Pemerintah Desa rendah .

3. TANTANGAN / ANCAMAN :

- a. Tuntutan masyarakat terhadap kinerja Aparatur penyelenggara Pemerintahan semakin tinggi ;.
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
- c. Pelayanan Prima ;
- d. Globalisasi .

BAB II RENCANA STRATEGIK

A. RENCANA STRATEGIK :

Adalah berisikan langkah yang akan diambil/dilakukan oleh Kecamatan Sambeng agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional maupun global dengan tetap berada dalam tatatan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan Perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, Kecamatan Sambeng dengan visi dan misinya yang diselaraskan dengan potensi yang dimiliki, peluang yang ada dan kendala-kendala yang dihadapi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.

1. VISI:

Adalah berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi Kecamatan Sambeng adalah "TERWUJUDNYA PELAYANAN MASYARAKAT PRIMA, TERARAH, TERKENDALI, BERKESINAMBUNGAN DI SEGALA BIDANG DAN MENDORONG MASYARAKAT UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA".

2. MISI

- a. Peningkatan pelayanan administrasi Kecamatan ;
- b. Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa ;
- c. Peningkatan pemberdayaan perekonomian dan pembangunan ;
- d. Peningkatan Kesejahteraan Sosial ;
- e. Pemantapan ketentraman dan ketertiban .

3. TUJUAN

- a. Terwujudnya administrasi di sekretariat Kecamatan yang baik dan valid ;
- b. Terselenggaranya peningkatan Pemerintahan Umum dan Pem Desa ;
- c. Terlaksananya koordinasi perekonomian dan pembangunan ;

- d. Terwujudnya Kesejahteraan sosial masyarakat ;
- e. Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat .

B. RENCANA KINERJA

Merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja Kantor Kecamatan Sambeng melalui kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja dimaksud ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Unit Kerja Kecamatan Sambeng untuk mencapainya dalam tahun 2004.

1. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN :

- a. Terwujudnya tertib administrasi umum di Sekretariat Kecamatan Sambeng dengan indikator sasaran :
 - 1) Jumlah surat masuk dan keluar yang ditangani ;
 - 2) Jumlah laporan kepegawaian ;
 - 3) Pembinaan administrasi umum ;
 - 4) Pengiriman peserta diklat .
- b. Terciptanya koordinasi yang baik dengan Instansi dan pelaksana terkait maupun dengan unsur Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan semua kegiatan dengan indikator sasaran :
 - 1) Jumlah rapat koordinasi dengan Kacabdin/UPT/Instansi ;
 - 2) Jumlah rapat kerja dengan Kades, BPD dan Perangkat Desa ;
 - 3) Intensitas Pembinaan administrasi Pemerintahan Desa .
- c. Terselenggaranya koordinasi pembangunan secara konsisten guna peningkatan perekonomian masyarakat dengan indikator sasaran :

- 1) Jumlah Rapat Koordinasi dengan Kacabdin/UPT dan Kades, BPD Tokoh Masyarakat ;
 - 2) Frekuensi pengawasan pelaksanaan pembangunan ;
 - 3) Frekuensi pelaporan pelaksanaan pembangunan ;
 - 4) Intensitas Pembinaan pengusaha Kecil dan Menengah .
- d. Terdapatnya koordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan indikator sasaran :
- 1) Frekuensi pemantauan pendistribusian RASKIN ,
 - 2) Tersalurnya dana kompensasi kenaikan BBM tepat sasaran .
- e. Tercapainya peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator :
- 1) Jumlah pemantauan KAMTIBMAS dengan aparat Keamanan ke desa ;
 - 2) Frekuensi inspeksi kepemilikan ijin usaha/HO dan sejenisnya ke perusahaan perusahaan yang ada di Kecamatan Sambeng ;
 - 3) Optimalisasi pelunasan pajak dan retribusi daerah .

2. PROGRAM :

- a. Pelayanan administrasi kesekretariatan ;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa ;
- c. Pelaksanaan dan pengadministrasian Rapat koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ;
- d. Pelaksanaan dan pengadministrasian distribusi beras untuk KK miskin maupun PKSBBM ;
- e. Pemantauan Situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban kecamatan maupun pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah .

3. KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN :

- a. Pengurusan administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga ;
 - 1) Jumlah Surat masuk dan keluar ;
 - 2) Jumlah Laporan Kepegawaian ;
 - 3) Jumlah Barang inventaris Yang dilaporkan.
- b. Pengurusan Pemerintahan Umum dan fasilitasi Pemerintahan Desa :
 - 1) Rapat koordinasi dengan Cab. Din /UPT se Kecamatan Sambeng ;
 - 2) Rapat kerja dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ;
 - 3) Fasilitasi Penyelesaian Peraturan Desa dan LPJ Kepala Desa .
- c. Pengurusan Rapat koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan :
 - 1) Rapat koordinasi pembangunan dengan Cab. Din / UPT se Kecamatan;
 - 2) Jumlah laporan kegiatan pembangunan ;
 - 3) Frekuensi pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) .
- d. Pengurusan dan fasilitasi distribusi RASKIN serta PKSBBM :
 - 1) Frekuensi pemantauan distribusi beras untuk KK miskin (RASKIN) dan dana kompensasi kenaikan BBM (PKSBBM) ;
 - 2) Pelaporan penerima RASKIN dan PKSBBM .
- e. Pengurusan pemantauan Situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban maupun penegakan Peraturan Daerah
 - 1) Jumlah pemantauan KAMTIBMAS dengan aparat Keamanan ke desa ;
 - 2) Frekuensi inspeksi kepemilikan ijin usaha/HO dan sejenisnya ke perusahaan perusahaan yang ada di Kecamatan Sambeng ;
 - 3) Optimalisasi pelunasan pajak dan retribusi daerah .

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA :

Adalah digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dalam pengukuran Kinerja tidak terlepas dari faktor internal dan faktor eksternal yang ada di Wilayah Kecamatan Sambeng. Faktor internal antara lain meliputi Jumlah, SDM Perangkat Daerah yang ada di Sekretariat Kecamatan Sambeng, sarana dan prasana kerja maupun dukungan dana. Sedangkan faktor eksternal antara lain meliputi Jumlah dan SDM unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa, tuntutan masyarakat maupun era globalisasi .

Pengukuran kinerja Unit Kerja Kantor Kecamatan Sambeng dalam tahun 2004 secara rinci dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) . .

B. EVALUASI KINERJA

Dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai misi selama tahun 2004, maka dapat dilakukan evaluasi sebagai berikut :

1. Pengurusan administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga , dengan indikator meliputi jumlah surat masuk dan keluar, jumlah laporan kepegawaian dan jumlah barang inventaris yang dilaporkan kesemuanya telah dapat dilaksanakan, meskipun disadari oleh karena keterbatasan tenaga administrasi (PNS) di bawah koordinasi Sekretaris Kecamatan hanya 1 (satu) orang terkadang pelaporannya sedikit terlambat. Untuk mengatasi kekurangan staf yang ada di bawah koordinasi Sekcam yaitu mengoptimalkan staf yang ada di Seksi yang lain. Pengiriman peserta DIKLAT guna peningkatan SDM telah dilaksanakan sesuai alokasi.

2. Pengurusan Pemerintahan Umum dan fasilitasi Pemerintahan Desa dengan indikator meliputi Rapat koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas / Unit Pelaksana Tehnis se Kecamatan Sambeng, rapat kerja dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Sambeng. Dalam kegiatan ini terdapat 1 (satu) hal seiring dengan era demokratisasi, yakni tingkat kehadirannya tidak bisa maksimal. Upaya yang kami lakukan menghadapi situasi yang demikian adalah mengadakan pemanggilan kepada yang bersangkutan.

Fasilitasi Penyelesaian Peraturan Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa, selama ini aktif kami lakukan dengan memberikan contoh-contoh kepada Pemerintah Desa maupun pembinaan ke desa. Dari upaya dimaksud meskipun belum memberikan hasil yang memuaskan tetapi unsur Pemerintahan Desa telah mulai memahami dan menyadari arti pentingnya Peraturan Desa sebagai landasan berpijak dalam mengelola Pemerintahan Umum di Desa. Beberapa kendala yang ada disamping Sumber Daya Aparat Penyelenggara Pemerintahan Desa yang relatif belum sejalan dengan makna Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga karena keterbatasan sarana dan prasarana tehnis .

3. Pengurusan Rapat koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, dengan indikator meliputi frekuensi rapat koordinasi pembangunan dengan Cabang Dinas / Unit Pelaksana Tehnis se Kecamatan Sambeng, Jumlah laporan kegiatan pembangunan dan Frekuensi pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) . Terhadap kegiatan dimaksud selama Tahun 2004 telah dilaksanakan rapat Koordinasi Perencanaan, Rapat Koordinasi Pelaksanaan, dan rapat koordinasi Pengawasan Pembangunan. Kegiatan rapat / musyawarah telah dapat berjalan dengan baik dan hasilnya juga secara rutin (selesai rapat) selalu dilaporkan kepada Bupati Lamongan.

Namun terkadang dari usulan yang kami ajukan, dimana usulan dimaksud merupakan rekapitulasi usulan dari bawah (Bottom up planning) tidak seluruhnya membuahkan hasil (disetujui). Dalam kaitan ini kami sangat menyadari karena disesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah. Sedangkan terkait dengan pembinaan kepada UKM secara insidental kami lakukan sesuai dengan kemampuan anggaran. Mengenai pelaporan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan senantiasa kami laporkan kepada Bupati Lamongan sesuai dengan situasi dan kondisi riil.

4. Pengurusan dan fasilitasi distribusi RASKIN serta PKSBBM dengan indikator Frekuensi pemantauan distribusi beras untuk KK miskin (RASKIN) dan dana kompensasi kenaikan BBM (PKSBBM). Pelaporan penerima RASKIN dan PKSBBM. Terhadap fasilitasi distribusi beras untuk KK miskin (RASKIN) setiap KK mendapatkan jatah beras tiap bulan sebanyak 20 (dua puluh) Kg telah berjalan dengan baik dan lancar. Adapun jumlah KK kategori miskin penerima beras bersubsidi se Kecamatan selama tahun 2004 adalah 3.117 KK. Dengan demikian jumlah beras yang tersalur di Kecamatan Sambeng adalah sebanyak 748.080 Kg.

Sedangkan peruntukan dana yang berasal dari Program Kompensasi Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKSBBM) selain beras untuk KK miskin di atas, antara lain yang meliputi pendidikan dan kesehatan telah disalurkan kepada yang berhak melalui Cabang Dinas/Instansi/UPT se Kecamatan Sambeng, yang dalam kaitan ini senantiasa dalam koordinasi dan pengawasan kami sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 55 Tahun 2001.

5. Pengurusan pemantauan Situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban maupun penegakan Peraturan Daerah, dengan indikator meliputi Jumlah pemantauan KAMTIBMAS dengan aparat Keamanan ke desa, Frekuensi inspeksi kepemilikan ijin usaha/HO dan sejenisnya ke perusahaan perusahaan

yang ada di Kecamatan Sambeng dan Optimalisasi pelunasan pajak dan retribusi daerah . Pemantauan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat telah secara rutin dilakukan ke desa-desa se Kecamatan bersama dengan aparat keamanan (POLSEK dan Koramil) secara sinergi. Dalam kaitan ini terdapat satu kendala yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahwa aktifitas penjagaan Keamanan Lingkungan (KAMLING) cenderung menurun. Sedangkan upaya kami adalah tetap menekankan kepada seluruh Kepala Desa agar penjagaan pos kamling tetap dilakukan. Sedangkan terhadap upaya pelunasan PBB dari baku tahun 2004 sebesar Rp. 161.127.102,- (seratus enam puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus dua rupiah) telah lunas sebelum tanggal jatuh tempo. Pelaporan dan inventarisasi subyek dan obyek pajak / retribusi baru senantiasa kami cukupi sesuai dengan permintaan dan situasi .

C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Selama Tahun anggaran 2004 dengan program kegiatan dan sasaran yang dilaksanakan dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi, kami berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada telah berupaya semaksimal mungkin guna mewujudkan tercapainya good governance di Unit Kerja Kecamatan Sambeng. Dari upaya-upaya dimaksud kami sangat menyadari belum mampu memuaskan semua pihak. Beberapa kendala yang terjadi selama tahun 2004 antara lain dapat dirumuskan :

1. Masih adanya egoisme sektoral Cabang Dinas / Instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga dari kondisi ini dapat berdampak kepada sinkronisasi tujuan akhir pembangunan ;
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah yang ada di Sekretariat Kecamatan Sambeng ;
3. Terbatasnya SDM unsur Pemerintahan Desa ;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja unsur Pemerintahan Desa ;

5. Masa transisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 .

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN :

Dana yang digunakan Unit Kerja Kantor Kecamatan Sambeng selama Tahun Anggaran 2004 adalah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Mengingat pendanaan ini pengadministrasiannya / DASK nya berada di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, maka Pertanggungjawabannya (LAKIP) menjadi satu pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan. Sedangkan yang berupa dana pembangunan baik yang bermuara di Desa maupun PKS BBM pengelolaannya adalah melalui Dinas/Kantor/ Unit Kerja tingkat Kabupaten Lamongan, demikian juga LAKIPnya. Dana sebagaimana yang kami uraikan dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) LAKIP ini, adalah yang berupa dana swadaya tingkat Kecamatan (bukan tingkat Desa).

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sambeng dibuat sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999, dimana setiap Instansi Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya masing-masing dalam upaya menuju terciptanya good governance membuat laporan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pejabat yang memberi tugas. Oleh karena itu Pertanggungjawaban yang kami paparkan di depan adalah pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 07 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan.

Pada Tahun Anggaran 2004 Unit Kerja Kantor Kecamatan Sambeng telah melakukan berbagai kegiatan sebagai sarana untuk mencapai misi organisasi, namun didalam pelaksanaannya meskipun telah melalui perhitungan dan koordinasi yang cermat serta berkesinambungan masih belum dapat memuaskan semua pihak.

Kiranya dari pengalaman keberhasilan dan kekurangan yang terjadi selama Tahun Anggaran 2004, akan kami jadikan pemicu untuk berbuat lebih baik dalam Tahun Anggaran 2005, sehingga tujuan terciptanya good governance akan terwujud .

Sambeng, 15 Maret 2005

CAMAT SAMBENG



MARJONO, S.Sos

Penata Tingkat I
NIP. 510 057 220

LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIK Tahun 2004

FORMULIR RS

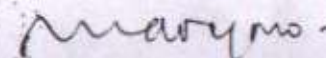
Instansi : Kecamatan Sambeng
 Visi : Terwujudnya pelayanan masyarakat prima, terarah, terkendali, berkesinambungan di segala bidang dan mendorong masyarakat untuk maju, mandiri dan sejahtera.
 Misi :
 a. Peningkatan pelayanan administrasi Kecamatan;
 b. Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa;
 c. Peningkatan pemberdayaan Perencanaan dan Pembangunan;
 d. Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
 e. Pemanfaatan Ketentraman dan Ketertiban.

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	KEBLUAKAN	PROGRAM	
1. Terwujudnya administrasi di Sekretariat Kecamatan yang baik dan valid;	1. Terwujudnya tertib administrasi umum di Sekretariat Kecamatan Sambeng;	3 a. Jumlah surat masuk dan keluar yg datang b. Jumlah laporan kepegawaian; c. Pembinaan administrasi umum; d. Pengiriman peserta dilat.	4 Mengupayakan pelayanan kegiatan pelayanan mutu administrasi umum, Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa, Perencanaan dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban masyarakat di Kecamatan Sambeng	5 1. Pelayanan administrasi ke sekretariat; 2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa; 3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan rencana, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	6 Oleh karena terdapat ketidaksesuaian dengan Rencana Strategis Kecamatan Sambeng Tahun 2002-2006 dengan Petunjuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Instansi LAKIP perlu diadakan penyelesaian sehingga terdapat ketertarikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
2. Terselenggaranya peningkatan koordinasi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa;	2. Terdapatnya koordinasi yang baik dengan instansi dan pelaksanaan terkait maupun dengan unsur pemerintahan Desa dalam pelaksanaan semua kegiatan.	a. Jumlah rapat koordinasi dengan Kacabidw UPT/Instansi; b. Jumlah Rakor dengan Kades, BPO dan Perangkat Desa; c. Intensitas pembinaan administrasi Pemerintahan Desa.			
3. Terlaksananya koordinasi Perencanaan dan Pembangunan;	3. Terselenggaranya koordinasi pembangunan secara konsisten guna peningkatan perekonomian masyarakat	a. Jumlah Rapat koordinasi dengan Kacabidw UPT dan Kades, BPO Tokoh masyarakat; b. Frekuensi pengawasan pelaksanaan pembangunan; c. Frekuensi pelaporan pelaksanaan pembangunan; d. Intensitas pembinaan pengusaha Kecil dan Menengah.			
4. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat;	4. Terdapatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat	a. Frekuensi pembinaan pendistribusian Raskin; b. Terselenggaranya dana kompensasi kenaikan BSM tepat sasaran.		4. Pelaksanaan dan pengkoordinasian distribusi beras untuk KK miskin maupun PKSSSB.	

1	2	3	4	5	6
5. Terwujudnya peningkatan Ketenraman dan Ketertiban umum di	5. Tercapainya peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	a. Terselenggaranya jaga Pos Kamling di semua Desa sampai tingkat RT; b. Jumlah laporan situasi dan kondisi Kecamatan; c. Monitoring situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban di semua desa; d. Penegakan Peraturan Daerah.		5. Pemantauan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban Kecamatan maupun pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.	

Sambeng, 15 Maret 2005

CAMAT SAMBENG



MARJONO, S. sos

Penata Tk. I

Nip. 510057220

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2004**

Instansi : Kecamatan Sambeng

FORMULIR RKT

SASARAN			KEGIATAN				KET	
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1	2	3	4	5	6	7		8
1. Terwujudnya terdistribusi administrasi umum di Sekretariat Kecamatan Sambeng ;	a. Jumlah surat masuk dan keluar yang dibongkar ; b. Jumlah laporan kepegawaian ; c. Pembinaan administrasi umum ; d. Pengiriman peserta diklat	200 srt 120 srt 12 kali sesuai lokasi	1. Pelayanan administrasi ke sekretarian ;	1. Pengurusan Adm ke-TU-an, Kepegawaian, pengiklapan dan Rumah Tangga ;	Input: Data: SDM Output: 1. Jumlah surat masuk dan keluar 2. Jumlah Laporan kepegawaian ; 3. Jumlah barang Inv yang dilaporkan.	Rupiah Craing Surat Kali Unit	2.000.000 2 200 4 100	
2. Terwujudnya koordinasi yang baik dengan Instansi dan Pelaksana terkait maupun dengan unsur Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan semua kegiatan	a. Jumlah rapat koordinasi dengan KacabdinUPT/Instansi ; b. Jumlah raker dengan Kades, BPD dan Perangkat Desa ; c. Intensitas pembinaan administrasi Pemerintahan Desa ;	12 kali 12 kali 12 kali	2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggara an Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa ;	2. Pengurusan Pemerintahan Umum dan fasilitas Pemerintahan Desa ;	Input: Data: SDM Output: 1. Rapat koordinasi dengan CabangdinUPT se Kec ; 2. Raker dengan Kades, Perangkat Desa dan BPD serta LPM ; 3. Penyelidikan Perdes dan LPJ Kades.	Rupiah Craing Kali Kali Buah	2.000.0000 75 6 12 50	
3. Terwujudnya koordinasi pembangunan secara konsisten guna peningkatan peran dan misi masyarakat	a. Jumlah rapat koordinasi dengan KacabdinUPT dan Kades, BPD, Tokoh Masyarakat ; b. Frekuensi pengawasan pelaksanaan pembangunan ; c. Frekuensi pelaporan dan pelaksanaan pembangunan ; d. Intensitas pembinaan pengusaha Kecil dan Menengah ;	3 kali 6 kali 12 kali 12 kali	3. Pelaksanaan dan pengadinasian rapat Koordinasi Pemerintahan, Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	3. Pengurusan rapat koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan ;	Input: Data: SDM Output: 1. Rapat koordinasi Pembangunan dengan ca dinUPT se Kec ; 2. Jumlah laporan kegiatan Pembangunan ; 3. Jumlah Pembinaan UKM ;	Rupiah Craing Kali Kali Kali	1.000.000 80 3 4 4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Terjadinya koordinasi peningkatan Kesejahteraan masyarakat	a. Frekuensi pemantauan pendistribusian RASKIN; b. Terselenggaranya kompensasi tanaman BBM tepat sasaran.	12 kali 12 kali	4. Pelaksanaan dan pengadainan kegiatan distribusi beras untuk KK miskin maupun PKSEBM;	4. Pengrusakan dan fasilitas distribusi RASKIN serta PKSEBM	Induk: Dana: SOM Output: 1. Frekuensi pemantauan distribusi RASKIN dan dana kompensasi tanaman BBM; 2. Pelaporan penerimaan RASKIN dan PKSEBM.	Rupiah Orang Kali Kali	1.200.000 4 12 12	
5. Terjadinya peningkatan ketertarikan dan ketertarikan masyarakat	a. Terselenggaranya Jaga Pos Kamling di semua desa sampai tingkat RT; b. Jumlah laporan situasi dan kondisi Kecamatan; c. Monitoring situasi dan kondisi ketertarikan dan ketertarikan di semua desa; d. Penegakan Peraturan Daerah	12 kali 12 kali 12 kali 12 kali	5. Pemantauan situasi dan kondisi ketertarikan dan ketertarikan Kecamatan maupun Penegakan Peraturan Daerah.	5. Pengrusakan pemantauan Situasi dan kondisi ketertarikan dan ketertarikan maupun Penegakan Peraturan Daerah.	Induk: Dana: SOM Output: 1. Jumlah pemantauan KAMTEMAS dengan aparat Kecamatan ke Desa; 2. Frekuensi inspeksi ke pemukiman di usaha/HH dan selanjutnya ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Sambeng; 3. Optimalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah	Rupiah Orang Kali Kali	1.200.000 10 24 12	
						Kali	12	

Sambeng, 15 Maret 2006

CAMAT SAMBENG



MARJONO, S. SPS
Penata Tk. I
Nip. 510057220

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
Tahun 2004

Instansi : Kecamatan Sambeng

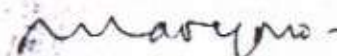
Formulir PKK

PROGRAM	KEGIATAN					PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
	URAIAN	INDIKATAOR	SATU AN	RENCANA TINGKTA CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pelayanan administrasi kesekretariat;	1. Pengurusan adm Ke-TU-an, Kepegawaian, Perengkapan & Rumah Tangga;	Input: Dana: SDM Output: 1. Jumlah surat masuk dan keluar; 2. Jumlah Laporan kepegawaian; 3. Jumlah Barang inventaris yang dilaporkan.	Rupiah Orang Surat Kali Unit	2.000.000 2 200 4 100	2.000.000 2 200 4 100	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	
2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa;	2. Pengurusan Pemerintahan Umum dan fasilitasi Pemerintahan Desa;	Input: Dana: SDM Output: 1. Rapat koordinasi dengan Cab.Din/UPT se Kecamatan; 2. Rakor dengan Kedes, Perangkat Desa dan BPD serta LPM; 3. Penyelesaian perdes dan LPJ Kades	Rupiah Orang Kali Kali Bush	2.000.0000 75 8 12 50	2.000.0000 75 8 12 50	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	
3. Pelaksanaan dan pengadministrasian rapat koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;	3. Pengurusan rapat koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;	Input: Dana: SDM Output: 1. Rapat koordinasi pembangunan dengan Cab.Din/UPT se kecamatan; 2. Jumlah laporan kegiatan pembangunan; 3. Jumlah pembinaan UKM.	Rupiah Orang Kali Kali Kali	5.000.000 80 3 4 4	5.000.000 80 3 4 4	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	

1	2	3	4	5	6	7	8
4. Pelaksanaan dan Pengadministrasian distribusi untuk KK miskin maupun PKSBM;	4. Pengurusan dan fasilitasi distribusi RASKIN serta PKSBM;	Input: Dana: SDM Output: 1. Frekuensi pemantauan distribusi RASKIN dan dana kompensasi kembalikan BBM; 2. Pelaporan penerima RASKIN dan PKSBM.	Rupiah Orang Kali Kali	1.200.000 4 12 12	1.200.000 4 12 12	100 % 100 % 100 % 100 %	
5. Pemantauan situasi dan kondisi ketertarikan dan ketertarikan kecamatan maupun pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.	5. Pengurusan pemantauan situasi dan kondisi ketertarikan dan ketertarikan maupun penegakan Peraturan Daerah.	Input: Dana: SDM Output: 1. Jumlah pemantauan KAMTIBAS dengan aparat keamanan ke desa; 2. Frekuensi inspeksi lain usaha/IO dan sejenisnya ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Sambeng; 3. Optimalisasi pelunasan pajak dan retribusi daerah.	Rupiah Orang Kali Kali Kali	5.500.0000 10 24 12 12	5.500.0000 10 24 12 12	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	

Sambeng, 15 Maret 2005

CAMAT SAMBENG



MARJONO, S. sos

Penata Tk. I

Nip. 510057220

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
Tahun 2004

Instansi : Kecamatan Sambeng

Formulir PPS

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6
1. Terejadnya tertib administrasi umum di Sekretariat Kecamatan Sambeng ;	a. Jumlah surat masuk dan keluar yang ditangani ; b. Jumlah laporan kepegawaian ; c. Pembinaan administrasi umum ; d. Pengiriman peserta diklat.	200 art 120 art 12 kali sesuai alokasi	200 art 120 art 12 kali sesuai alokasi	100 % 100 % 100 % 100 %	
2. Terciptanya koordinasi yang baik dengan instansi dan pelaksana terkait maupun dengan unsur Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan semua kegiatan ;	a. Jumlah rapat koordinasi dengan Kabdin/Instansi b. Jumlah raker dengan Kades, BPD dan Perangkat Desa ; c. Intensitas Pembinaan administrasi Pemerintahan Desa..	12 kali 12 kali 12 kali	12 kali 12 kali 12 kali	100 % 100 % 100 %	
3. terselenggaranya koordinasi pembangunan secara konsisten guna peningkatan perekonomian masyarakat ;	a. Jumlah rapat Koordinasi dengan Kabdin/UPT dan Kades, BPD Tokoh Masyarakat ; b. Frekuensi pengawasan pelaksanaan pembangunan c. Frekuensi pelaporan pelaksanaan pembangunan ; d. Intensitas Pembinaan pengusaha Kecil dan Menengah.	3 kali 6 kali 12 kali 12 kali	3 kali 6 kali 12 kali 12 kali	100 % 100 % 100 % 100 %	
4. Terdapatnya koordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat ;	a. Frekuensi pemantauan pendistribusian RASKIN ; b. Tersakurnya dana kompensasi kenaikan BBM tepat sasaran.	12 kali 12 kali	12 kali 12 kali	100 % 100 %	
5. Tercapainya peningkatan ketenteraman dan ketertiban.	a. Jumlah pemantauan KAMTIBMAS dengan aparat Keamanan ke desa ; b. Frekuensi inspeksi kepemilikan ijin usaha/HO dan sejeninya ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Sambeng ; c. Optimalisasi pelunasan pajak dan retribusi daerah.	24 kali 12 kali 12 kali	24 kali 12 kali 12 kali	100 % 100 % 100 %	

Sambeng, 15 Maret 2005



CAMAT SAMBENG

MARJONO, S. sos

Penata Tk. I

Nip. 510057220